

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTA dan Estimasi Peserta Didik untuk Proyeksi Kebutuhan Ruang Belajar Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2029

Heru Setiawan ^{1,*}, Puji Hardati ², Edi Kurniawan ³

¹²³ Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati Semarang 50229, Indonesia

*) Email Korespondensi: herrstiawn@students.unnes.ac.id

Abstract

Sitasi:

Setiawan, H ¹, Hardati, P ²., Kurniawan, E ³, (2025). *Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTA dan Estimasi Peserta Didik untuk Proyeksi Kebutuhan Ruang Belajar Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2029*. Jurnal Sains Geografi. Vol. 3 Issue 2

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Juli 2025
Revisi: 17 November 2025
Disetujui: 18 November 2025
Online: 25 November 2025
Publikasi: 25 November 2025

The increasing trend in school participation at the SLTA level (SMA/SMK/MA) in Wonosobo Regency has led to a rising demand for educational facilities, particularly classrooms. This study aims to analyze facility availability, project student enrollment, and identify additional classroom needs in 2029. A quantitative-descriptive approach was employed. The analysis shows there are 70 SLTA units with varying service capacities. By 2029, student enrollment is projected to reach 36,448, with distribution patterns following the availability of existing facilities. Classroom demand increases in line with student growth. Currently, there is both a shortage and surplus of 82 classrooms, with shortages mainly found in public SLTA. The additional classroom need by 2029 is estimated at 156 units. To promote equitable access, service coverage, and reduce centralization, new public SLTA are recommended in Garung, Kejajar, and Leksono Districts.

Keyword: Availability, SLTA educational facilities, student enrollment, projection, classrooms.

Abstrak



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Tren peningkatan partisipasi sekolah jenjang SLTA (SMA/SMK/MA) di Kabupaten Wonosobo berdampak pada meningkatnya kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya ruang belajar. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketersediaan, proyeksi jumlah peserta didik, dan mengidentifikasi tambahan kebutuhan ruang belajar tahun 2029. Pendekatan yang digunakan kuantitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukkan terdapat 70 unit SLTA dengan daya layan beragam. Pada 2029, peserta didik diproyeksikan mencapai 36.448 jiwa, dengan distribusi mengikuti sebaran fasilitas tersedia. Kebutuhan ruang belajar meningkat seiring pertumbuhan peserta didik. Saat ini terdapat kekurangan dan kelebihan ruang belajar masing-masing 82 unit, dengan kekurangan dominan pada SLTA negeri. Tambahan kebutuhan ruang belajar 2029 diperkirakan sebanyak 156 unit, untuk pemerataan akses, jangkauan, dan mengurangi sentralitas, diperlukan pendirian SLTA negeri di Kecamatan Garung, Kejajar, dan Leksono. Kata Kunci: ketersediaan, fasilitas pendidikan SLTA, peserta didik, proyeksi, ruang belajar.

1. PENDAHULUAN

Masalah utama pendidikan seperti pemerataan, tingkat partisipasi, mutu dan relevansi, efisiensi, serta efektivitas masih menjadi masalah utama pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor seperti laju pertumbuhan penduduk dan biaya yang mahal (Nurhuda, 2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat kebijakan terkait program percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Kebijakan tersebut ditujukan kepada semua anak usia sekolah yang tidak besekolah agar dapat kembali bersekolah, tujuannya untuk pemerataan pendidikan berkualitas sebagai modal pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Kenyataannya program wajib belajar 12 tahun belum mampu secara maksimal pada daerah-daerah tertentu, hal ini bisa diakibatkan pada akses pendidikan yang tidak mendukung, jumlah peserta didik yang tidak sebanding dengan sekolah, maupun adanya budaya yang mempengaruhi peserta didik (Margiyanti & Maulia, 2023).

Statistik Pendidikan Indonesia 2023 menunjukkan semakin tinggi kelompok umur persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) semakin meningkat, terlihat bahwa ATS kelompok umur 16-18 tahun atau usia pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 19,20%, dengan wilayah perdesaan angka ATS sebanyak 24,50% (Badan Pusat Statistik, 2024). Data Pokok Pendidikan Kemendikbud dan EMIS Kemenag 2024, jumlah SLTA di Kabupaten Wonosobo sebanyak 70 unit dengan rincian jenis 17 unit SMA, 30 unit SMK, dan 23 unit MA dengan 19 unit sekolah negeri dan 51 unit sekolah swasta. Jumlah peserta didik SLTA mencapai 30.745 jiwa dengan sebaran terbanyak pada jenis SMK 15.317 jiwa. Sebaran jumlah fasilitas pendidikan SLTA di setiap kecamatan juga masih sangat timpang, karena Kecamatan Wonosobo terdapat 12 unit, sedangkan Kecamatan Kalibawang hanya terdapat 1 unit. Kartika & Fikriyah (2023) memberikan kesimpulan bahwa meningkatnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas, termasuk fasilitas pendidikan tujuannya agar penduduk dapat terlayani untuk mengakses fasilitas pendidikan.

Penduduk yang tinggal pada suatu wilayah membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan untuk menjalankan kehidupan dan aktivitasnya, sehingga diperlukan analisis untuk melihat gambaran secara nyata terkait pencapaian pelayanan publik serta evaluasinya (Muta'ali, 2015:193). Perencanaan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan SLTA dapat menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dengan tujuan supaya terjadi keseimbangan antara jumlah peserta didik terhadap jumlah SLTA yang tersedia maupun jumlah ruang belajar untuk menampung peserta didik. Penyediaan fasilitas pendidikan SLTA yang tidak proporsional serta jangkauan pelayanan yang melebihi daya tampung fasilitas akan mengakibatkan sebagian masyarakat tidak terlayani secara efektif, akibatnya terjadi kecenderungan untuk memilih sekolah di luar tempat tinggalnya, maka dari itu perlu adanya evaluasi guna mengetahui tingkat keefektifan terhadap fasilitas yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan penduduk (Uang et al., 2017). Penduduk tersebut terutama pada penduduk usia potensial SLTA yaitu 16-18 tahun yang harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi jumlah fasilitas maupun jumlah unit ruang belajar yang tersedia pada suatu wilayah.

Pertumbuhan penduduk dan proses perencanaan harus sejalan agar tercipta pemerataan kesempatan dan pembangunan yang adil bagi semua pihak. Pentingnya melakukan perencanaan untuk kedepannya dengan memproyeksikan penduduk, khususnya pada tahun 2029 mendatang untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan SLTA. Proyeksi pendidikan SLTA bermanfaat untuk memperkirakan banyaknya jumlah kebutuhan peserta didik, jumlah guru dan tenaga pendidik, jumlah sarana prasarana pendidikan SLTA termasuk kebutuhan ruang belajar (Purnomo, 2019).

dilakukan dengan teknik studi dokumen dari instansi daerah baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui Website BPS, Dapodik, EMIS Kemenag, dan Disdukcapil.

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis ketersediaan fasilitas, analisis proyeksi penduduk geometrik, analisis tetangga terdekat, dan analisis kebutuhan ruang belajar. Analisis ketersediaan fasilitas digunakan untuk mengidentifikasi jumlah serta kelengkapan fasilitas pendidikan SLTA pada setiap kecamatan dilihat dari banyaknya pilihan terhadap jumlah, jenis, dan statusnya, menggunakan skala Guttman yaitu dengan bentuk nominal tersedia (1) dan tidak tersedia (0). Tingkat ketersediaan dihitung dengan jumlah eksisting serta persentase jumlah unit yang tersedia dari total wilayahnya.

Analisis proyeksi geometrik digunakan untuk mengestimasi jumlah peserta didik dan penduduk usia 16-18 tahun sebagai dasar untuk melihat daya tampung fasilitas pada tahun 2029.

$$P_t = P_0 \cdot (1 + r)^t$$

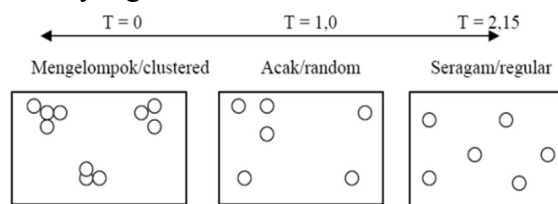
Keterangan:

- P_t : Jumlah penduduk pada tahun t
 P_0 : Jumlah penduduk pada tahun awal
 r : Angka pertumbuhan penduduk geometrik
 t : Periode proyeksi dalam tahun

Untuk mencari pertumbuhan penduduk dengan:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Analisis tetangga terdekat digunakan untuk menganalisis sebaran keruangan fasilitas pendidikan SLTA dan permukiman penduduk. Analisis dapat dilakukan menggunakan ArcGIS 10.8 dengan *tools nearest neighbor analysis*. Kriteria tersebut didasarkan pada indeks T yaitu untuk mengetahui apakah persebaran objek tersebut mengelompok, acak, atau seragam, dengan hasil akhir berupa nilai indeks yang berkisar dari 0-2,15.



Gambar 2. Klasifikasi pola sebaran menggunakan *nearest neighbor analysis*

Analisis kebutuhan ruang belajar menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004, sehingga akan mendapatkan hasil proyeksi tambahan kebutuhan ruang belajar.

$$S_{SLTA} = \frac{(L_{SLTP10} - L_{SLTPS}) \times a\%}{E}$$

Keterangan:

- S_{SLTA} : Kebutuhan ruang belajar tingkat SLTP
 L_{SLTP10} : Proyeksi lulusan SLTP selama 5 tahun
 L_{SLTPS} : Jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung
 $a\%$: Presentase lulusan SLTP yang lanjut STLA
 E : Daya tampung paling efektif dan efisien peserta didik (Permendikbudristek No 23 Tahun 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTA

Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas salah satunya dengan metode skala Guttman yaitu dengan bentuk nominal tersedia (1) dan tidak tersedia (0). Skala Guttman penting digunakan untuk mengetahui jumlah ketersediaan fungsi pelayanan wilayah serta perkembangannya untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan metode skalogram guna mengukur hierarki pusat pelayanan (Muta'ali, 2015). Hasil analisis ketersediaan menunjukkan bahwa Kecamatan Wonosobo memiliki fasilitas pendidikan SLTA terlengkap yaitu 6 jenis baik negeri maupun swasta meliputi SMA, SMK, dan MA. Sebaliknya, Kecamatan Kalibawang memiliki ketersediaan fasilitas terendah dengan satu jenis, yaitu SMK negeri. Kecamatan lainnya menunjukkan variasi antara 2-5 jenis dengan status negeri maupun swasta dengan persentase 33,33%-83,33%. SLTA swasta memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan khususnya jenis SMK dan MA. Ketersediaan fasilitas menjadi objek analisis lanjutan untuk mengetahui tingkat ketersediaan, yang dihitung dengan jumlah unit tersedia, sehingga menjadi informasi penting kaitannya dengan penyediaan pelayanan dan alokasi ruang pada wilayah yang membutuhkan.

Tabel 1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTA 2025

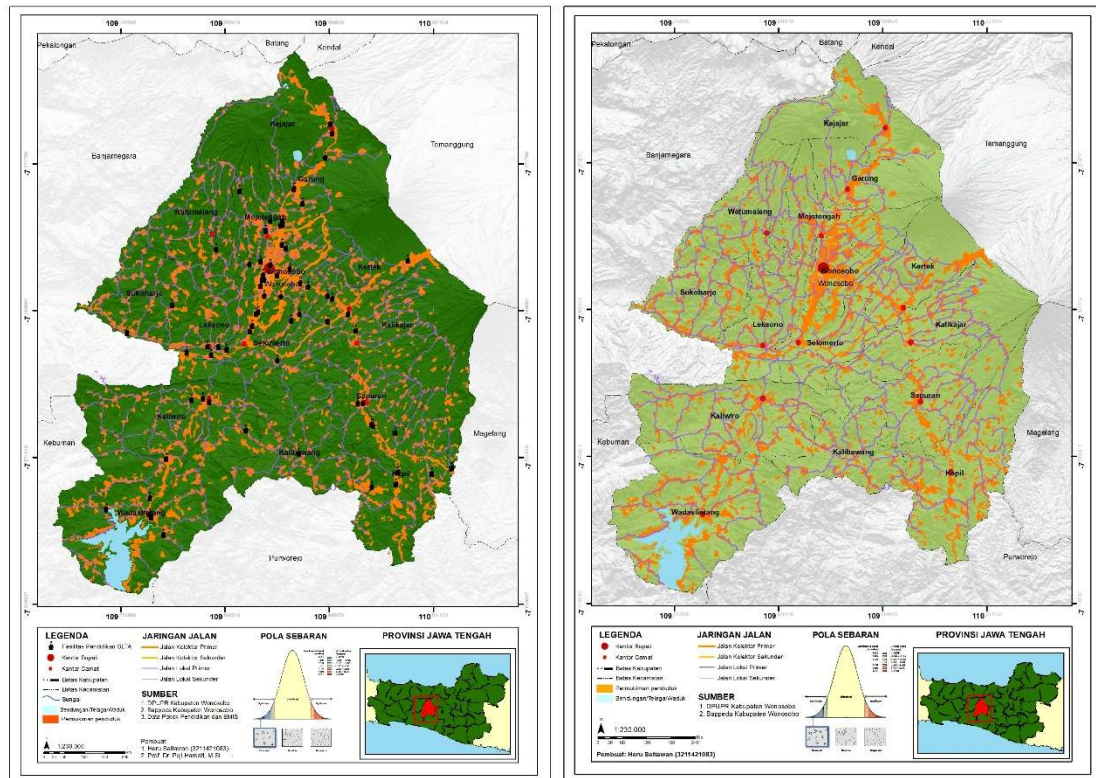
No	Kecamatan	Negeri			Swasta			JF	KF(%)
		SMA	SMK	MA	SMA	SMK	MA		
1	Wadaslintang	1	1	0	1	2	1	6	8,57
2	Kepil	0	1	0	1	2	3	7	10,00
3	Sapuran	1	1	0	0	0	2	4	5,71
4	Kalibawang	0	1	0	0	0	0	1	1,43
5	Kaliwiro	1	0	0	0	2	1	4	5,71
6	Leksono	0	0	0	1	2	1	4	5,71
7	Sukoharjo	0	1	0	0	0	1	2	2,86
8	Selomerto	2	0	0	0	3	3	8	11,43
9	Kalikajar	0	1	0	0	0	1	2	2,86
10	Kertek	1	0	0	0	2	2	5	7,14
11	Wonosobo	1	2	1	2	4	2	12	17,14
12	Watumalang	1	0	0	0	1	1	3	4,29
13	Mojotengah	1	0	1	2	2	1	7	10,00
14	Garung	0	0	0	0	1	1	2	2,86
15	Kejajar	0	0	0	1	1	1	3	4,29
Kab Wonosobo		9	8	2	8	22	21	70	100

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Catatan: JF = jumlah fasilitas, KF = ketersediaan fasilitas

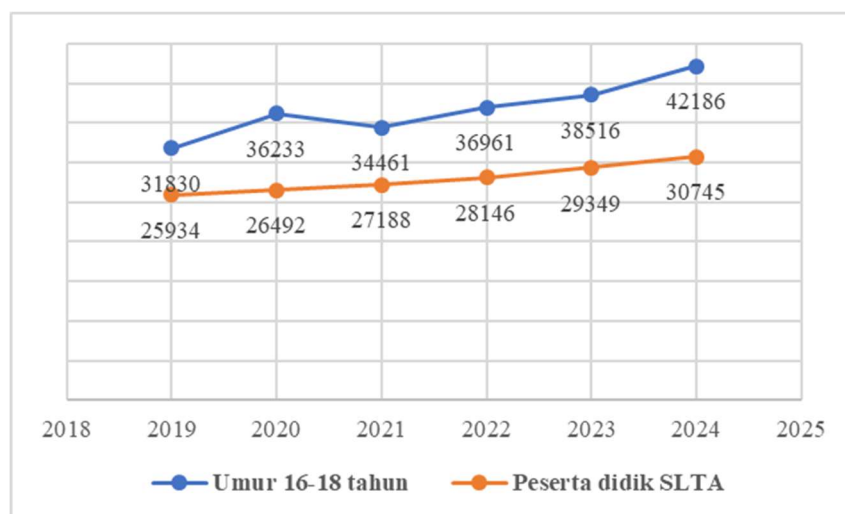
Kecamatan Wonosobo sebagai ibu kota kabupaten memiliki konsentrasi pelayanan pendidikan yang tinggi yaitu terdapat 12 unit fasilitas pendidikan SLTA dengan jenis dan status yang lengkap. Kecamatan lain seperti Selomerto, Kepil, dan Mojotengah relatif memiliki tingkat pelayanan pendidikan cukup dibandingkan wilayah lainnya. Ketersediaan dan tingkat ketersediaan menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan SLTA di Kabupaten Wonosobo masih cukup terpusat seperti di Kecamatan Wonosobo dan Mojotengah. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penyediaan akses yang merata dengan adanya fasilitas pendidikan SLTA negeri. Kecamatan Leksono, Garung, dan Kejajar pada saat ini belum memiliki SLTA negeri.

Lokasi satuan fasilitas pendidikan diharapkan berada di kawasan permukiman penduduk dengan jarak optimum, tujuannya agar peserta didik tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau fasilitas pendidikan serta dalam perencanaan pengembangan fasilitas pendidikan diutamakan menyebar mengikuti pola sebaran permukiman penduduk (Febrianty et al., 2022). Melalui metode *nearest neighbor analysis* visualisasinya adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Pola sebaran fasilitas pendidikan SLTA (kiri) dan permukiman (kanan)
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sebaran keruangan lokasi fasilitas pendidikan SLTA di Kabupaten Wonorejo menunjukkan tipe pola mengelompok berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat dengan indeks 0,71. Analisis pola sebaran fasilitas perlu mempertimbangkan pola sebaran permukiman penduduk, karena penduduk sebagai pengguna aktual layanan fasilitas SLTA, pengguna aktual fasilitas tersebut adalah peserta didik aktif yang sedang menempuh pendidikan SLTA. Peserta didik pada SLTA menurut Statistik Pendidikan berada pada rentang usia 16-18 atau disebut sebagai penduduk potensial usia SLTA. Adapun data *time series* 2019-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2 Grafik peserta didik aktual dan potensial
Sumber: Dapodik dan EMIS Kemenag, 2025

Tahun 2019-2024 mengalami tren peningkatan pertambahan sebanyak 10.356 penduduk. Jumlah peserta didik SLTA juga mengalami kenaikan sebanyak 4.811 jiwa selama lima tahun. Meskipun terdapat peningkatan jumlah peserta didik SLTA, selisih antara penduduk 16-18 tahun dan peserta didik menunjukkan bahwa tidak seluruh penduduk usia 16-18 tahun mengakses pendidikan jenjang SLTA. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sebaran permukiman penduduk. Sebaran permukiman penduduk menunjukkan indeks 0,81 yang juga tersebar mengelompok. Indeks sebaran fasilitas pendidikan SLTA cenderung lebih mengelompok dibandingkan permukiman penduduk, artinya terdapat permukiman penduduk yang perlu menjangkau dengan jarak yang jauh, bahkan hanya untuk memilih sekolah terdekatnya. Berikut hasil survei *online* kepada 120 peserta didik di 4 kecamatan terkait dengan jangkauan yang diperlukan oleh peserta didik.

Tabel 2. Jangkauan dan Jarak Peserta Didik Menuju SLTA

No	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1	Jarak SLTA dari alamat peserta didik		
	a. ≤ 3 kilometer	31	25,83
	b. 4-7 kilometer	34	28,33
	c. 8-11 kilometer	27	22,50
	d. ≥ 12 kilometer	28	23,33
2	Lokasi SLTA tempat menempuh pendidikan		
	a. Kecamatan sama	55	45,83
	b. Kecamatan berbeda	61	50,83
	c. Kabupaten berbeda	4	3,33

Sumber: Survei *online* peserta didik, 2025

Hasil data survei *online* tersebut, terlihat bahwa banyak peserta didik tidak memilih lokasi fasilitas terdekatnya pada kecamatan yang sama, artinya terdapat faktor lain selain jarak dan lokasi yang memengaruhi peserta didik untuk memilih layanan pendidikan SLTA. Kemampuan fasilitas pendidikan SLTA dalam melayani peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kelengkapan sarana, sumber daya manusia, sekolah unggul, lokasi sekolah, biaya pendidikan, ekstrakurikuler, serta mutu pendidikan (Lestari et al., 2019).

Proyeksi Peserta Didik SLTA

Proyeksi angka peserta didik dihitung berdasarkan data histori laju pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah yang dipengaruhi oleh beberapa aspek demografi termasuk kelahiran, kematian, dan migrasi yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun (Astawa & Sarmita, 2018). Pertumbuhan penduduk pada penelitian ini dimaksudkan khusus pada pertumbuhan peserta didik SLTA yang digunakan untuk proyeksi kebutuhan ruang belajar. Proyeksi dianalisis untuk jangka 5 tahun kedepan yaitu tahun 2029, hasil proyeksi peserta didik 2029 diprediksi mencapai 36.448 peserta didik dengan pertumbuhan 3,46% per tahun. Hasil analisis pertumbuhan dan proyeksi secara rinci di setiap kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Proyeksi Peserta Didik SLTA Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik SLTA		Laju Pertumbuhan (%)	Proyeksi 2029
		2019	2.024		
1	Wadaslintang	1.891	2.336	4,32	2.886
2	Kepil	1.189	1.614	6,30	2.191
3	Sapuran	1.570	2.233	7,30	3.176
4	Kalibawang	357	598	10,87	1.002
5	Kaliwiro	589	920	9,33	1.437
6	Leksono	586	421	-6,40	302

Lanjutan

7	Sukoharjo	750	1.075	7,47	1.541
8	Selomerto	2.700	2.501	-1,52	2.317
9	Kalikajar	424	853	15,00	1.716
10	Kertek	1.517	1.753	2,93	2.026
11	Wonosobo	8.217	8.891	1,59	9.620
12	Watumalang	604	870	7,57	1.253
13	Mojotengah	4.922	5.849	3,51	6.951
14	Garung	163	303	13,20	563
15	Kejajar	455	528	3,02	613
Kab. Wonosobo		25.934	30.745	3,46	36.448

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pertumbuhan dan proyeksi peserta didik pada suatu wilayah kecamatan tidak selalu mencerminkan jumlah penduduk potensial usia sekolah yang terdapat pada kecamatan tersebut, namun secara umum berkaitan erat dengan jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia. Jumlah penduduk potensial pada jenjang SLTA yaitu berusia 16-18 tahun diproyeksikan mencapai 55.991 jiwa di tahun 2029 dengan laju pertumbuhan 3,96% per tahun. Hasil pertumbuhan dan proyeksi secara rinci tiap kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Proyeksi Penduduk Usia 16-18 Tahun Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2029

No	Kecamatan	Penduduk Umur 16-18 Tahun		Laju Pertumbuhan (%)	Proyeksi 2029
		2019	2024		
1	Wadaslintang	2.084	3.009	7,62	4.345
2	Kepil	2.241	3.184	7,28	4.524
3	Sapuran	2.228	2.942	5,72	3.885
4	Kalibawang	1.849	2.393	5,29	3.097
5	Kaliwiro	1.680	2.274	6,24	3.078
6	Leksono	1.943	2.623	6,19	3.541
7	Sukoharjo	2.302	3.221	6,95	4.507
8	Selomerto	2.917	4.481	8,97	6.884
9	Kalikajar	3.358	4.547	6,25	6.157
10	Kertek	2.093	2.649	4,82	3.353
11	Wonosobo	2.415	3.117	5,24	4.023
12	Watumalang	2.333	2.629	2,42	2.963
13	Mojotengah	1.975	2.226	2,42	2.509
14	Garung	1.331	1.616	3,96	1.962
15	Kejajar	1.081	1.275	3,36	1.504
Kab. Wonosobo		31.830	42.186	5,80	55.991

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penduduk potensial yang tinggi pada suatu wilayah tidak selalu diikuti oleh jumlah peserta didik yang tinggi di wilayah tersebut, hal ini bisa disebabkan oleh tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan yang rendah, rendahnya angka partisipasi pendidikan, maupun faktor geografis yang menghambat penduduk usia sekolah untuk melanjutkan sampai SLTA seperti faktor jangkauan dan aksesibilitas. Alasan lain bisa disebabkan karena peserta didik memilih layanan fasilitas yang lebih berkualitas dan lokasinya berada diluar kecamatan domisilnya, peserta didik di beberapa kecamatan. Oleh karena itu perlu untuk menghitung rasio peserta didik yang melanjutkan ke SLTA secara total di Kabupaten Wonosobo.

Tingkat rasio ketersediaan fasilitas pendidikan mencerminkan daya tampung satuan pendidikan dalam menampung penduduk pada usia sekolah tersebut (Halina et al., 2022). Rasio yang dianalisis adalah tingkat rasio lulus lanjut yang menggambarkan seberapa banyak peserta didik yang melanjutkan dari jenjang SLTP ke SLTA yang memberikan gambaran tentang efektivitas transisi pendidikan serta potensi hambatan yang mungkin dihadapi, seperti keterbatasan akses maupun faktor sosial ekonomi. Rasio lulus lanjut peserta didik mencapai 0,80% di tahun 2024, adapun rincian data rasio lulus lanjut 2017-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Rasio Lulus Lanjut Peserta Didik SLTP yang Melanjutkan SLTA

No	Peserta didik SLTP		Peserta didik SLTA		Rasio lulus lanjut
	Tahun	Peserta didik	Tahun	Peserta didik	
1	2014	37.944	2017	24.748	0,6522
2	2015	37.994	2018	25.555	0,6726
3	2016	38.213	2019	25.934	0,6786
4	2017	37.742	2020	26.492	0,7019
5	2018	37.427	2021	27.188	0,7264
6	2019	37.708	2022	28.146	0,7464
7	2020	38.362	2023	29.349	0,7650
8	2021	38.208	2024	30.745	0,8046

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kenaikan rasio lulus-lanjut tersebut mencerminkan membaiknya akses terhadap pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah, serta kemungkinan adanya dukungan kebijakan yang mendorong transisi jenjang pendidikan. Rasio yang belum mendekati 1 mengindikasikan sebagian lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, geografis, maupun keterbatasan daya tampung. Rasio dapat digunakan untuk melihat daya tampung dan kesiapan fasilitas pendidikan SLTA berupa sarana yang mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik SLTP yang akan melanjutkan ke SLTA.

Daya tampung fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah maksimal peserta didik pada setiap unit fasilitas yang diinterpretasikan dengan banyaknya jumlah rombongan belajar pada setiap wilayah (Henlita & Handayeni, 2013). Daya tampung fasilitas disesuaikan dengan batas maksimal efektif peserta didik setiap rombongan belajar yang disesuaikan dengan jumlah ruang belajar. Jumlah ruang belajar mencapai 992 unit dengan daya tampung 35.712 peserta didik, sedangkan jumlah rombongan belajar eksisting sedikit lebih tinggi yaitu 996 unit dengan daya tampung 35.856 peserta didik, artinya terdapat penggunaan ruang lain untuk kegiatan pembelajaran. Adapun data rinci daya tampung fasilitas setiap kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Daya Tampung Fasilitas Pendidikan SLTA Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Kecamatan	Rombongan belajar		Ruang belajar	
		Unit	Daya tampung	Unit	Daya tampung
1	Wadaslintang	79	2.844	67	2.412
2	Kepil	59	2.124	55	1.980
3	Sapuran	66	2.376	76	2.736
4	Kalibawang	18	648	14	504
5	Kaliwiro	36	1.296	39	1.404
6	Leksono	25	900	29	1.044
7	Sukoharjo	33	1.188	31	1.116
8	Selomerto	86	3.096	93	3.348
9	Kalikajar	24	864	20	720
10	Kertek	60	2.160	61	2.196
11	Wonosobo	276	9.936	281	10.116
12	Watumalang	30	1.080	22	792
13	Mojotengah	170	6.120	167	6.012
14	Garung	12	432	13	468
15	Kejajar	22	792	24	864
	Kab. Wonosobo	996	35.856	992	35.712

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap unit rombongan belajar adalah 36 peserta didik, sesuai dengan pedoman Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jumlah rombongan belajar mencerminkan daya tampung aktual terhadap peserta

didik yang sedang menjalani atau mengikuti proses pembelajaran, sedangkan rombongan belajar mencerminkan estimasi jumlah peserta didik SLTA yang dapat ikut serta secara aktif belajar dalam sistem pendidikan formal di seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki jumlah rombongan belajar yang lebih sedikit dari jumlah ruang belajar yang tersedia seperti Kecamatan Sapuran, Kaliwiro, Leksono, Selomerto, Kertek, Wonosobo, Garung, dan Kejajar, artinya kecamatan tersebut masih memiliki ruang belajar yang kosong, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menerima tambahan peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran.

Proyeksi Kebutuhan Ruang Belajar

Kebutuhan fasilitas pendidikan, seperti ruang belajar merupakan masalah yang dihadapi di berbagai daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya (Asadullah, 2009 dalam Nuranti, 2017). Ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah ruang belajar tersedia menyebabkan kelebihan daya tampung, menghambat efektivitas pembelajaran, dan menurunnya kenyamanan belajar. Jumlah kekurangan dan kelebihan ruang belajar menunjukkan angka yang sama yaitu 82 unit, namun hal tersebut tidak langsung dapat disubstitusikan karena jumlah sebaran yang bervariasi, adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 7. Kondisi Eksisting Jumlah Ruang Belajar SLTA di Kabupaten Wonosobo 2024

No	Kecamatan	Kekurangan Ruang Belajar		Kelebihan Ruang Belajar	
		Unit	Lokasi	Unit	Lokasi
1	Wadaslintang	10	SMKN 1 Wadaslintang	-	
		2	SMA Ma'arif Wadaslintang	-	
2	Kepil	7	SMKN 1 Kepil	1	MA Ar Risalah Kepil
		-	-	2	SMK Al Madani
3	Sapuran	3	SMAN 1 Sapuran	2	MA Manbaul Chikmah
		-	-	11	MA Berbaur
4	Kalibawang	4	SMKN 1 Kalibawang	-	-
5	Kaliwiro	1	SMAN 1 Kaliwiro	1	MA Nurul Qur'an
		-	-	3	SMK Muh 3 Wonosobo
6	Leksono	-	-	2	SMA Ma'arif Leksono
		-	-	2	SMK Taruna Negara
7	Sukoharjo	2	SMKN 1 Sukoharjo	-	
		-	-	2	MA Matholi Ul Anwar
8	Selomerto	-	-	3	MA Takhassus Al Qur'an
		-	-	2	SMK Wiratama 45.2 Wonosobo
9	Kalikajar	8	SMKN 1 Kalikajar	4	MA SA Al Hikam Cendekia
10	Kertek	1	SMAN 1 Kertek	4	MA NU Darul Islah
		-	-	2	SMK Andalusia
11	Wonosobo	11	SMKN 1 Wonosobo	1	MA As Shofa Wonosobo
		12	SMKN 2 Wonosobo	4	SMA Kristen Wonosobo
		2	SMK Informatika Wonosobo	1	SMA Muh Wonosobo
		-	-	1	SMK Gema Nusantara
		-	-	21	SMK Muh 1 Wonosobo
12	Watumalang	-	-	2	SMK Wiratama 45.1 Wonosobo
		8	SMAN 1 Watumalang	-	-
13	Mojotengah	4	SMAN 1 Mojotengah	3	MAN 2 Wonosobo
		7	SMK Takhassus Al Qur'an Wonosobo	5	SMA Takhassus Al Qur'an
14	Garung	-	-	1	SMK Karya Mandiri NU Garung
15	Kejajar	-	-	2	SMA NU Kejajar

Sumber: Dapodik dan EMIS, 2025

Data ruang belajar di beberapa kecamatan, seperti Wadaslintang, Wonosobo, Kalikajar, dan Watumalang, mengalami kekurangan yang cukup signifikan, terutama pada sekolah negeri seperti SMKN 1 Wadaslintang, SMKN 1 Wonosobo, SMK N 1 Kalikajar, dan SMAN 1 Watumalang. Kekurangan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tekanan terhadap fasilitas

pendidikan formal seiring meningkatnya jumlah peserta didik. Sebaliknya, beberapa satuan pendidikan swasta menunjukkan kelebihan ruang belajar, seperti SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, MA NU Darul Islah Kertek, dan MA Berbaur Sapuran. Fenomena tersebut mencerminkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang belajar, karena sebagian sekolah mengalami kelebihan kapasitas sementara sekolah lain memiliki daya tampung belum optimal.

Kabupaten Wonosobo perlu melakukan perencanaan kebutuhan ruang belajar jenjang SLTA secara terukur, khususnya untuk proyeksi tahun 2029. Perencanaan tersebut menjadi penting dilakukan guna mengestimasi pertumbuhan jumlah peserta didik serta memastikan ketersediaan ruang belajar yang memadai dan sesuai standar. Pedoman yang dapat digunakan adalah SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang salah satunya mencantumkan standar kebutuhan ruang belajar berdasarkan jumlah peserta didik. Perhitungan kebutuhan ruang belajar tahun 2029 akan didasarkan pada proyeksi jumlah peserta didik SLTA dan disesuaikan dengan rasio ideal kapasitas ruang belajar sesuai ketentuan. Adapun hasil proyeksi kebutuhan ruang belajar tahun 2029 sebagai berikut.

$$S_{SLTA} = \frac{(L_{SLTP5} - L_{SLTPS}) \times \alpha\%}{E}$$

Proyeksi lulusan SLTP tahun 2029

Pertumbuhan (r) peserta didik 2014-2019 adalah sebagai berikut.

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

$$r = \left(\frac{40.117}{37.708}\right)^{1/5} - 1$$

$$r = 0,0124$$

Hasil proyeksi peserta didik SLTP tahun 2029 adalah sebagai berikut.

$$P_{2029} = (1 + r)^t$$

$$P_{2029} = (1 + 0,0124)^5$$

$$P_{2029} = 42.680 \text{ peserta didik}$$

Jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung

$$DT = \text{Jumlah ruang belajar eksisiting} \times \text{Daya tampung efektif (36)}$$

$$DT = 992 \times 36$$

$$DT = 35.712 \text{ peserta didik}$$

Persentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA

$$P_{lulus-lanjut} = \frac{\text{Jumlah peserta SLTA eksisiting}}{\text{Jumlah peserta didik SLTP 3 tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$P_{lulus-lanjut} = \frac{30.745 \text{ pesetya didik}}{38.208 \text{ peserta didik}} \times 100$$

$$P_{lulus-lanju} = 80,46\%$$

Adapun hasil proyeksi kebutuhan ruang belajar serta distribusi pada setiap kecamatan tahun 2029 di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

$$S_{SLTA} = \frac{(42.680 - 35.712) \times 80,46\%}{36}$$

$$S_{SLTA} = \frac{(39.108) \times 80,46\%}{36}$$

$$S_{SLTA} = 156 \text{ unit ruang belajar}$$

Rincian sebaran kebutuhan ruang belajar untuk setiap kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 8. Proyeksi Kebutuhan Ruang Belajar Fasilitas Pendidikan SLTA Tahun 2029

No	Kecamatan	Persentase Peserta Didik SLTA		Kebutuhan Ruang Belajar 2024	Kebutuhan Ruang Belajar 2029
		Jumlah	Persentase		
1	Wadaslintang	2.886	7,91	12	12
2	Kepil	2.191	6,01	7	9
3	Sapuran	3.176	8,71	3	13
4	Kalibawang	1.002	2,74	4	4
5	Kaliwiro	1.437	3,94	1	6
6	Leksono	302	0,83	-	2
7	Sukoharjo	1.541	4,22	2	6
8	Selomerto	2.317	6,35	-	10
9	Kalikajar	1.716	4,70	8	7
10	Kertek	2.026	5,55	1	8
11	Wonosobo	9.620	26,39	25	40
12	Watumalang	1.253	3,43	8	5
13	Mojotengah	6.951	19,07	11	29
14	Garung	563	1,54	-	2
15	Kejajar	613	1,68	-	3
Kab. Wonosobo		36.448	100,00	82	156

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa terjadi konsentrasi kebutuhan ruang belajar di kawasan tengah kabupaten yang memiliki jumlah peserta didik lebih besar, serta kecamatan yang memiliki jenis SLTA negeri yang cukup lengkap yang dapat ditandai dengan ketersediaan SMA, SMK, MA negeri dalam satu kecamatan di wilayah tersebut. Kecamatan yang akan diproyeksikan kebutuhan ruang belajarnya ≥ 10 unit ditandai dengan ketersediaannya ≥ 2 SLTA negeri seperti Kecamatan Wadaslintang dan Sapuran dengan masing-masing 1 SMK negeri dan 1 SMA negeri; Kecamatan Selomerto dengan 2 SMA negeri; Kecamatan Wonosobo dengan 1 SMA negeri, 2 SMK negeri, serta 1 MA negeri; dan Kecamatan Mojotengah dengan 1 SMA negeri dan 1 MA negeri. Pada tahun 2024 telah terjadi kekurangan jumlah ruang belajar yang ditandai dengan jumlah rombongan belajar yang lebih besar, kekurangan pada tahun 2024 sebanyak 82 unit ruang belajar yang tersebar di 11 kecamatan kecuali Kecamatan Selomerto, Leksono, Garung, dan Kejajar yang saat ini masih tercukupi.

3.2. PEMBAHASAN

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTA

Kajian ketersediaan dan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan SLTA digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kesenjangan pelayanan antar wilayah di Kabupaten Wonosobo. Ketersediaan fasilitas pada suatu wilayah sangat berkaitan erat dengan pencapaian dibidang pendidikan (Uang et al., 2017). Wilayah bagian tengah seperti Kecamatan Wonosobo dan Mojotengah memiliki jenis dan status dengan jumlah terbanyak, sehingga kecamatan tersebut memiliki lebih banyak pilihan layanan pendidikan. Keberadaan sekolah unggulan dan favorit di ibu kota maupun pusat kabupaten memperkuat persepsi masyarakat akan kualitas pendidikan yang lebih baik, daya tariknya semakin tinggi, dan mendorong konsentrasi fasilitas SLTA di wilayah tersebut. Kecamatan Kalibawang, Garung, Kalikajar, dan Sukoharjo terbatas dalam aspek jumlah, jenis, maupun status layanan fasilitas pendidikan SLTA.

Persebaran fasilitas pendidikan SLTA seharusnya tidak hanya berdasarkan jumlahnya, namun juga memperhatikan aspek sebaran kualitasnya, berdasarkan akreditasinya hanya terdapat 15 unit atau 21,42% SLTA terakreditasi A meliputi Kecamatan Wadaslintang, Sapuran, Kaliwiro, Selomerto, dan Watumalang masing-masing 1 unit, Kertek 2 unit, Mojotengah 3 unit, serta Wonosobo 5 unit. Selain itu, sebaran SLTA negeri juga tidak tersebar

dan tersedia di seluruh kecamatan, seperti Kecamatan Garung, Kejajar, dan Leksono sampai saat ini belum memiliki SLTA negeri.

Kecenderungan sebaran terlihat bahwa SLTA dengan akreditasi A serta SLTA negeri lebih memiliki melayani lebih banyak peserta didik. SLTA negeri dan SLTA dengan akreditasi A setidaknya melayani > 400 peserta didik. Kecamatan Garung, Kejajar, Leksono jumlah peserta didik total satu kecamatannya merupakan yang terendah, yaitu Kecamatan Garung 303 peserta didik, Kejajar 528 peserta didik, dan Leksono 421 peserta didik. Perbedaan kondisi mencerminkan perlunya kolaborasi peran pemerintah dengan setiap unit fasilitas pendidikan SLTA supaya tercapai ketersediaan dan jangkauan yang berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan Febrianty et al., (2022) yaitu lokasi fasilitas pendidikan diharapkan berada dalam kawasan permukiman penduduk dengan jarak optimum, tujuannya agar peserta didik tidak memerlukan jarak yang jauh untuk menjangkau fasilitas pendidikan dalam pengembangan fasilitas pendidikan diutamakan menyebar mengikuti pola sebaran keruangan permukiman.

Proyeksi Peserta Didik SLTA

Kecamatan Kalikajar memiliki jumlah penduduk usia 16-18 tahun tertinggi, sedangkan Kecamatan Kejajar memiliki jumlah terendah. Penduduk potensial yang tinggi pada suatu wilayah tidak selalu diikuti dengan jumlah peserta didik yang tinggi pula pada wilayah tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan, daya tampung, kualitas fasilitas pendidikan SLTA, serta perbedaan persepsi pada peserta didik. Faktanya peserta didik tertinggi terdapat di Kecamatan Wonosobo dan Mojotengah, sebagaimana jumlah penduduk potensial kurang dari jumlah peserta didik. Secara spasial, wilayah dengan jumlah peserta didik yang lebih besar dari penduduk potensialnya cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dan aksesibilitas baik, sehingga menarik peserta didik dari luar wilayahnya. Hal ini mencerminkan daya tarik dan daya saing wilayah tersebut sebagai pusat layanan pendidikan, namun juga menunjukkan bahwa analisis kebutuhan ruang belajar tidak bisa hanya mengacu pada data penduduk lokal, tetapi juga perlu mempertimbangkan mobilitas peserta didik antar wilayah.

Peningkatan jumlah penduduk secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas pelayanan termasuk fasilitas pendidikan (Munawaroh et al., 2020). Perencanaan menggunakan proyeksi penduduk sejalan dengan Beti (2012) dalam Dinda et al., (2022) yaitu data kependudukan tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan eksisting, tapi juga dapat menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang dengan menggunakan proyeksi penduduk. Analisis terhadap proyeksi peserta didik menunjukkan bahwa proyeksi berfungsi sebagai alat prediktif dan preventif. Secara prediktif, proyeksi memberi gambaran tren demografis dan pola pertumbuhan pendidikan berdasarkan data historis. Secara preventif, proyeksi membantu menghindari kesenjangan layanan pendidikan, seperti kekurangan fasilitas di daerah dengan pertumbuhan tinggi atau kelebihan daya tampung di daerah dengan penurunan peserta didik. Rasio lulus lanjut peserta didik SLTP yang melanjutkan SLTA menjadi aspek pendukung yang cukup penting untuk perencanaan kebutuhan ruang belajar.

Jumlah rombongan belajar mencerminkan daya tampung aktual terhadap peserta didik yang sedang menjalani proses pembelajaran bukan daya tampung berdasarkan ketersediaan jumlah ruang belajar yang tersedia pada kondisi eksisting, daya tampung yang digunakan untuk analisis kebutuhan ruang belajar menggunakan data jumlah ruang belajar yang tersedia. Tujuannya agar SLTA dengan jumlah rombel lebih banyak dari jumlah ruang belajar yang tersedia ikut dipertimbangkan guna meningkatkan kecukupan dan keseimbangan. Analisis ini sejalan dengan Khafid (2020) bahwa daya tampung fasilitas pendidikan merupakan banyaknya calon peserta didik yang dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketersediaan fasilitas serta daya dukung yang dimiliki oleh setiap satuan fasilitas pendidikan. Proyeksi peserta didik

yang semakin tinggi akan meningkatkan kebutuhan ruang belajar dan semakin memenuhi daya tampung maksimal yang masih tersedia.

Proyeksi Kebutuhan Ruang Belajar

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan redistribusi sumber daya, baik melalui pembangunan unit ruang belajar baru di sekolah negeri yang kekurangan maupun optimalisasi pemanfaatan ruang di SLTA swasta yang terdapat kelebihan ruang belajar. Peningkatan mutu dan branding SLTA swasta dapat menjadi strategi untuk menarik lebih banyak peserta didik dan menyeimbangkan beban antara negeri dan swasta. Pendekatan perencanaan juga harus berbasis analisis tren partisipasi pendidikan, sebaran demografis penduduk potensial usia 16-18 tahun, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. SLTA swasta dengan kelebihan ruang belajar, misalnya perlu didorong melalui dukungan pemerintah dalam bentuk kemitraan, peningkatan akreditasi, dan program insentif lainnya yang memungkinkan peningkatan minat masyarakat untuk mendaftar. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat peran sektor swasta dalam pemerataan pendidikan, tanpa mengorbankan kualitas.

Proyeksi jumlah peserta didik yang telah dianalisis dapat menjadi acuan utama dalam merumuskan kebutuhan program pendidikan lainnya, seperti penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan, serta berbagai aspek pendukung lain yang bertujuan memfasilitasi peserta didik (Santosa & Rahmawati, 2018). Kebutuhan ruang belajar tahun 2029 dianalisis dengan menggunakan pedoman pada SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Indikator yang digunakan meliputi proyeksi lulusan SLTP selama lima tahun, jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung, persentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA, serta daya tampung 36 peserta didik berdasarkan pedoman teknis Permendikbudristek No 22 tahun 2023. Angka proyeksi peserta didik lebih besar dari jumlah peserta didik yang dapat ditampung, maka artinya akan ada tambahan kebutuhan ruang belajar. Distribusi proyeksi tambahan kebutuhan ruang belajar didasarkan pada persentase jumlah peserta didik terhadap peserta didik total kabupaten. Distribusi proyeksi tambahan ruang belajar ini sangat berkaitan dan berbanding lurus dengan kemampuan menampung peserta didiknya, sebagaimana Kecamatan Wonosobo diproyeksikan pada tahun 2029 dibutuhkan tambahan 65 ruang belajar dan Mojotengah sebanyak 40 ruang belajar.

Kondisi yang sama juga terlihat bahwa kecamatan yang tidak memiliki SLTA negeri yaitu Garung, Kejajar, dan Leksono proyeksi tambahan kebutuhan ruang belajar cukup rendah dibandingkan 12 kecamatan lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan ambang batas atau *threshold* peserta didik, sehingga setiap satu unit fasilitas pendidikan SLTA mampu melayani secara efektif. Adanya *threshold* atau ambang batas kelayakan pelayanan fasilitas dimaksudkan supaya lokasi pusat pelayanan tetap bisa bertahan, sehingga terjamin kelangsungan pelayanannya (Sadyohutomo, 2008:127). Kecamatan Garung meresmikan pembentukan SMAN 1 Garung pada tanggal 10 April 2025, yang sebelumnya menginduk di SMAN 1 Mojotengah. Pendirian SMAN 1 Garung tersebut akan memudahkan jangkauan peserta didik di Kecamatan Garung dan Kejajar serta wilayah sekitarnya yang selama ini belum memiliki SLTA negeri, yang sebelumnya untuk mengakses SLTA negeri harus menempuh jarak cukup jauh menuju Kecamatan Mojotengah dan Wonosobo sebagai pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan sekolah baru, apabila direncanakan dengan proyeksi kebutuhan yang matang, dapat mengurangi beban fasilitas pendidikan eksisting, memperpendek jarak tempuh, dan meningkatkan partisipasi sekolah, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sebelumnya mungkin terkendala secara geografis dan finansial.

Kecamatan Leksono dan Kejajar juga belum memiliki satupun SLTA negeri, sementara jumlah penduduk potensial usia 16-18 tahun pada wilayah tersebut cukup tinggi dan terus bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan jangkauan layanan pendidikan. Melalui analisis jumlah peserta didik di wilayah sekitarnya, maka Kecamatan Leksono dan Kejajar perlu mendirikan SMK negeri. Penduduk Kecamatan Leksono untuk melanjutkan

SMK negeri harus menuju ke SMKN 1 Sukoharjo, SMKN 1 Wonosobo, maupun SMKN 2 Wonosobo sebagai pilihan lokasi terdekatnya, terlihat bahwa peserta didik di ketiga SMK tersebut sangat tinggi yaitu > 1.000 peserta didik dengan rombongan belajar > 30 unit, sehingga pendirian SMK negeri menjadi cukup ideal.

Kecamatan Kejajar juga dapat direncanakan dengan mendirikan SMK negeri, jangkauan yang cukup jauh yang harus dilalui penduduk untuk mengakses SMK negeri yaitu melewati Kecamatan Garung dan Mojotengah. Bahkan untuk menjangkau SMA negeri dari lokasi terdekatnya peserta didik harus menuju Kecamatan Mojotengah dan Watumalang serta melewati Kecamatan Garung, sehingga biaya layanan, waktu tempuh, serta jarak fasilitas pendidikan menuju SLTA negeri membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang cukup banyak. Setelah sebelumnya di Kecamatan Garung sudah diresmikan SMA negeri, maka menjadi ideal jika Kecamatan Kejajar didirikan SMK negeri, supaya penduduk di kedua kecamatan tersebut dapat memilih SLTA negeri baik SMA maupun SMK dan minat penduduk untuk melanjutkan ke SLTA negeri dapat terpenuhi. Alasan krusial pendirian SMK negeri di wilayah tersebut adalah untuk meningkatkan jangkauan serta mengurangi biaya layanan yang sebelumnya membutuhkan banyak biaya untuk sekadar mengakses layanan pendidikan. Keluarga kurang mampu lebih berisiko tidak melanjutkan ke jenjang SLTA karena faktor biaya dan jarak. Pendirian SLTA negeri di wilayah ini juga mendukung prinsip pemerataan pendidikan, memperkuat keadilan spasial, serta menjawab kebutuhan ruang belajar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah.

4. KESIMPULAN

Ketersediaan dan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan SLTA pada saat ini terbatas. Peserta didik cenderung memilih SLTA negeri meskipun harus menempuh jarak yang jauh untuk menjangkaunya. Sebaran mencukupi dari segi jumlah, namun SLTA negeri maupun SLTA terakreditasi A tidak tersedia di setiap kecamatan, sehingga perlunya kolaborasi antara sektor pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Wonosobo untuk menciptakan layanan pendidikan yang adil. Peserta didik pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 36.488 peserta didik dengan sebaran bervariasi. Rasio lulus lanjut peserta didik SLTP yang melanjutkan ke SLTA sebesar 0,80 artinya partisipasi pendidikan SLTA semakin baik yang ditandai dengan angka rasio semakin mendekati 1. Daya tampung fasilitas pendidikan SLTA masih belum mencukupi sampai tahun 2029, sehingga menjadi sangat penting untuk menghitung kekurangan kebutuhan ruang belajar serta meningkatkan kualitas pelayanan terutama di tiga Kecamatan yaitu Leksono, Garung, dan Kejajar.

Jumlah kebutuhan ruang belajar tahun 2029 diproyeksikan mencapai 156 unit. Sebaran didominasi pada SLTA negeri yang mengindikasikan tingginya minat penduduk untuk melanjutkan ke SLTA negeri. Hasil proyeksi kebutuhan ruang belajar sangat barbanding lurus dengan kemampuan satuan pendidikan dalam melayani peserta didik, semakin tinggi peserta didik proyeksi kebutuhan ruang belajar semakin tinggi pula. Tingginya beban fasilitas pendidikan di beberapa kecamatan salah satu solusinya dapat dilakukan dengan pemerataan pendirian SLTA negeri di Kecamatan Garung, Kejajar, dan Leksono agar layanan pendidikan dapat adil dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pengumpulan data dan penyusunan artikel. Dukungan, saran, serta referensi yang diberikan sangat membantu memperdalam kekritisan analisis yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari kajian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan 2024. *Badan Pusat Statistik*, 12, i–242. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. *Badan Standardisasi Nasional*, 1–58.
- Febrianty, I., Mahyudin, I., Camelia, D., Amalia, A., & Rahmi, N. S. (2022). *Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Vol. 7, Issue April).
- Henlita, S., & Handayeni, K. D. M. E. (2013). Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(2), 197–202.
- Indonesia, R. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 303.
- Indonesia, R. (2023). Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023*.
- Kartika, I. H. D., & Fikriyah, V. N. (2023). *Analisis Pola Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) Di Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, I. P., Sobri, A. Y., & Kusumaningrum, D. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Didik Dalam Pemilihan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Slta). *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(3), 167–171. <https://doi.org/10.17977/um027v2i32019p167>
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208.
- Munawaroh, L., Hikmah, N. 'Izzatul, & Pramulatsih, G. P. (2020). Evaluasi Kecukupan Spasial Dan Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 631–639. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.218>
- Muta'ali, L. (2015). Teknik analisis regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan. *Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG)*.
- Nuranti, D. (2017). Analisis Kebutuhan Ruang Kelas SD Berdasarkan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah Di Kota Cirebon. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 24(1), 107–118.
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 127–137.
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen kota dan wilayah: realita & tantangan*. Bumi Aksara.
- Santosa, H., & Rahmawati, D. (2018). Proyeksi Siswa di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. *Improvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 5(1), 46–55.
- Uang, O. L., Rengkung, M. M., & Sembel, A. S. (2017). Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Sltip Di Kecamatan Mapanget. *Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Sltip Di Kecamatan Mapanget*, 4(3), 234–244.